

# ISU Sepekan

## BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 Mei 2021 (21 Mei s.d. 27 Mei)

## KEBOCORAN DATA PRIBADI DAN URGENSI PEMBENTUKAN UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.**

Peneliti Madya/Hukum Pidana

lidya.widayati@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Kebocoran data pribadi dalam jumlah besar kembali terjadi. Kali ini diduga merupakan data yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) karena berisikan nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama Kotz yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (*reseller*) menawarkannya di sebuah forum daring Raid Forums. Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh lebih kurang 100.000.

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menambah panjang daftar kasus kebocoran data pribadi dalam dua tahun terakhir, seperti dugaan bocornya data pribadi yang dikelola oleh Tokopedia, Bhinneka.com, Kreditplus, RedDoortz, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, dari semua kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi, belum ada yang terungkap para pelakunya secara tuntas.

Kebocoran data pribadi akan berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu, mereka dapat menjadi korban kejahatan siber, seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, atau praktik *doxing*, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas negara. Kebocoran data penduduk memudahkan pihak manapun secara global untuk melancarkan operasi propaganda komputasional, seperti yang pernah diduga dilakukan Rusia dan skandal Cambridge Analytica dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ataupun referendum Brexit tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII), Yudi Prayudi, kebocoran data dari instansi tertentu selalu ditunggu pegiat *dark web*.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) berencana membentuk tim untuk menyelidiki kasus dugaan bocornya data ini yang didukung satuan lain termasuk dari Polda Metro Jaya. Dittipidsiber juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk diminta klarifikasi terhadap kasus ini. Upaya menelusuri kebocoran data pribadi juga telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BPJS Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyebutkan pihaknya telah menginvestigasi sampel data pribadi yang beredar di Raid Forums. Dari investigasi yang ditemukan data sampel berjumlah 100.002 data pribadi.

Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan, sejumlah pihak mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Bocornya 279 juta data warga Indonesia ini menjadi momentum untuk segera mengesahkan RUU PDP untuk memperkuat pengamanan data pribadi warga.

### SUMBER

Republika, 24 dan 25 Mei 2021; Kompas, 22 dan 24 Mei 2021; Media Indonesia, 23 dan 24 Mei 2021.